

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeirntahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah satuan unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna barang.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri atas Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Daerah;
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
12. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus.

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Keputusan Bupati ini dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk kepentingan identitas, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

1. Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
2. Kendaraan Perorangan Dinas;
3. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Kendaraan Dinas Operasional Tamu Very Important Person (VIP); dan
5. Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal.
6. Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah dalam huruf EA, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode/seri akhir wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dalam huruf HH.
7. Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih yang terdiri dari EA 1 HH sampai dengan EA 99 HH dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini diatur sebagai berikut:
2. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengguna kendaraan dinas.
3. Untuk kendaraan dinas milik instansi vertical dibiayai pada anggaran instansi vertical yang bersangkutan.
4. Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Kendaraan Dinas yang belum sesuai dengan ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TANGGAL 2023

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **NOMOR KENDARAAN BERMOTOR** |
| 1 | BUPATI SUMBAWA BARAT | EA 1 HH |
| 2 | WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT | EA 2 HH |
| 3 | KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 3 HH |
| 4 | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT | EA 4 HH |
| 5 | KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BARAT | EA 5 HH |
| 6 | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 6 HH |
| 7 | WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT (WK. 1) | EA 7 HH |
| 8 | WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT (WK. 2) | EA 8 HH |
| 9 | WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT (WK. 3) | EA 9 HH |
| 10 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | EA 10 HH |
| 11 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | EA 11 HH |
| 12 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | EA 12 HH |
| 13 | STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN | EA 13 HH |
| 14 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | EA 14 HH |
| 15 | STAF AHLI BIDANG APARATUR DAN KEMASYARAKATAN | EA 15 HH |
| 16 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 16 HH |
| 17 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 17 HH |
| 18 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 18 HH |
| 19 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 19 HH |
| 20 | INSPEKTUR INSPEKTORAT | EA 20 HH |
| 21 | SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | EA 21 HH |
| 22 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | EA 22 HH |
| 23 | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | EA 23 HH |
| 24 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | EA 24 HH |
| 25 | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH | EA 25 HH |
| 26 | KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH | EA 26 HH |
| 27 | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | EA 27 HH |
| 28 | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | EA 28 HH |
| 29 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 29 HH |
| 30 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | EA 30 HH |
| 31 | KEPALA DINAS KESEHATAN | EA 31 HH |
| 32 | KEPALA DINAS SOSIAL | EA 32 HH |
| 33 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | EA 33 HH |
| 34 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | EA 34 HH |
| 35 | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | EA 35 HH |
| 36 | KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | EA 36 HH |
| 37 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | EA 37 HH |
| 38 | KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | EA 38 HH |
| 39 | KEPALA DINAS PERTANIAN | EA 39 HH |
| 40 | KEPALA DINAS PERIKANAN | EA 40 HH |
| 41 | KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | EA 41 HH |
| 42 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | EA 42 HH |
| 43 | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | EA 43 HH |
| 44 | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN | EA 44 HH |
| 45 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | EA 45 HH |
| 46 | KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | EA 46 HH |
| 47 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | EA 47 HH |
| 48 | KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | EA 48 HH |
| 49 | KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | EA 49 HH |
| 50 | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | EA 50 HH |
| 51 | DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' | EA 51 HH |
| 52 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 52 HH |
| 53 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 53 HH |
| 54 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 54 HH |
| 55 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 55 HH |
| 56 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 56 HH |
| 57 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 57 HH |
| 58 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 58 HH |
| 59 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 59 HH |
| 60 | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN | EA 60 HH |
| 61 | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | EA 61 HH |
| 62 | KEPALA BAGIAN HUKUM | EA 62 HH |
| 63 | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | EA 63 HH |
| 64 | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | EA 64 HH |
| 65 | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | EA 65 HH |
| 66 | KEPALA BAGIAN UMUM | EA 66 HH |
| 67 | KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | EA 67 HH |
| 68 | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | EA 68 HH |
| 69 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 69 HH |
| 70 | CAMAT POTO TANO | EA 70 HH |
| 71 | CAMAT SETELUK | EA 71 HH |
| 72 | CAMAT TALIWANG | EA 72 HH |
| 73 | CAMAT BRANG ENE | EA 73 HH |
| 74 | CAMAT BRANG REA | EA 74 HH |
| 75 | CAMAT JEREWEH | EA 75 HH |
| 76 | CAMAT MALUK | EA 76 HH |
| 77 | CAMAT SEKONGKANG | EA 77 HH |
| 78 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 78 HH |
| 79 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 79 HH |
| 80 | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 80 HH |
| 81 | SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 81 HH |
| 82 | KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 82 HH |
| 83 | KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 83 HH |
| 84 | KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 84 HH |
| 85 | KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 85 HH |
| 86 | KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 86 HH |
| 87 | KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 87 HH |
| 88 | CADANGAN INSTANSI VERTIKAL | EA 88 HH |
| 89 | CADANGAN INSTANSI VERTIKAL | EA 89 HH |
| 90 | KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 90 HH |
| 91 | KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 91 HH |
| 92 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 92 HH |
| 93 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 93 HH |
| 94 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 94 HH |
| 95 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 95 HH |
| 96 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 96 HH |
| 97 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 97 HH |
| 98 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 98 HH |
| 99 | CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | EA 99 HH |

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN